

DINAMIKA KONFLIK PEMBEBASAN LAHAN KILANG MINYAK DI KABUPATEN TUBAN

THE DYNAMICS OF THE CONFLICT IN LAND ACQUISITION FOR OIL REFINERIES IN KABUPATEN TUBAN

Oleh: Fazmir Rizal Ali dan Dr. Marita Ahdiyana, S.I.P., M.Si, Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, fazmirrizal@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dinamika konflik yang terjadi dalam proses pembebasan lahan kilang minyak di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Urgensi penelitian ini dilakukan adalah untuk mengkaji akar masalah dari konflik dan upaya penyelesaian konflik yang terjadinya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi data. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika konflik dalam pembebasan lahan hanya berhenti sampai tahapan akibat karena masih terdapat masyarakat yang menolak tanahnya untuk diukur. Hal tersebut disebabkan masyarakat menginginkan harga yang pasti sedangkan PT. Pertamina tidak bisa memberikan nominal angka yang pasti dan tidak mempunyai alternatif lain sehingga belum dapat ditentukan pihak mana yang kalah, sehingga berdampak pada konflik yang belum terselesaikan. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik antara lain (1) perbedaan cara pengumpulan informasi, (2) ketidaksepakatan mengenai data yang relevan, (3) perbedaan cara menerjemahkan dan mengkaji informasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemangku kepentingan terkait dalam penyelesaian konflik dan pengembangan penelitian terkait lainnya.

Kata Kunci: Konflik, pembebasan lahan.

Abstract

The purpose of this study is to describe the dynamics of the conflict that occurred in the process of land acquisition for oil refineries in Kabupaten Tuban and be considered by various parties to resolve and avoid the same conflict. This research is a qualitative research and used study case approach using primary data and secondary data. Data collection techniques are carried out through interviews, observation, and documentation. The technique of checking the validity of data is done by source triangulation. Data analysis techniques are carried out through data collection, data reduction, data presentation, conclusions and verification. The result of this study showed that the dynamic of the conflict in land acquisition just ended in the effect step, because there are many people in the village that refuse their land to be measured. This caused by many people in the village want a definite price while PT. Pertamina cannot provide a definite nominal value and has no other alternative so the party to be defeated has not been determined yet so the conflict has not finished well. The factors that cause conflicts are (1) differences in the way information is collected, (2) disagreements regarding relevant data, (3) differences in how to translate and studying the information. The result of this study are expected to provide policy recommendations to the relevant stakeholders in the conflict resolution and other related research.

Keywords : Conflict Dynamics, Land Acquisition

PENDAHULUAN

Energi merupakan salah satu unsur yang sangat penting untuk menggerakkan roda perekonomian nasional. Konsumsi energi nasional akan terus meningkat seiring permintaan dari berbagai sektor terutama sektor industri dan transportasi (Kementerian ESDM, 2016). Dalam kajian pengembangan kilang Indonesia yang dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2016 proyeksi kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional dalam skala harian mencapai 1,6 juta barel per hari pada tahun 2030. Sedangkan kapasitas kilang minyak nasional hanya dapat melakukan produksi minyak sebanyak 800 ribu barrel per hari. Sehingga untuk menutup kebutuhan minyak nasional maka negara melakukan import minyak sebanyak 800 ribu barrel per hari (Kementerian ESDM, 2016). Dengan besarnya jumlah nilai import minyak yang dibutuhkan, maka akan berimbas pada tidak stabilnya harga minyak di pasaran dalam negeri.

Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 807 K/12/MEM/2016 tentang Penugasan Kepada PT Pertamina (Persero) dalam Pembangunan dan Pengoperasian Kilang Minyak di Tuban, Provinsi Jawa Timur merupakan pertanda

pemerintah berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi kebutuhan impor minyak Indonesia. Keputusan menteri tersebut kemudian didukung dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/23/KPTS/013/2019 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kilang Minyak di Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Tuban dipilih sebagai lokasi pembangunan kilang minyak baru sudah berdasarkan kajian dan pertimbangan yang menyeluruh, baik lokasi, topografi, juga pertimbangan studi kebumiharian (Sumber: www.katadata.co.id, diakses 15 Juli 2019 pukul 21.10). Kabupaten Tuban terletak di pesisir pantai utara sehingga akan mempermudah akses perkapalan untuk menunjang fasilitas kilang. Selain itu, PT. Pertamina (Persero) sangat berkeinginan kuat untuk membangun kilang di Tuban karena di Tuban sudah ada kompleks Petrokimia, yaitu PT. Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) yang menjadi modal awal dan nantinya akan diintegrasikan.

Untuk membangun kilang minyak baru dengan kapasitas produksi mencapai 300 ribu barel per hari, pihak Pertamina membutuhkan lahan dengan luas sekitar 841 hektar. Dengan rincian lahan milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) seluas 348

hektar, sisanya seluas 493 hektar merupakan tanah warga. Tanah tersebut berada dalam lingkup 5 desa yaitu Desa Wadung, Sumurgeneng, Kaliuntu, Rawasan, dan Mentoso, dimana ke-lima desa tersebut berada dalam wilayah administrasi Kecamatan Jenu (Sumber: www.bloktuban.com, diakses 14 Juli 2019, pukul 19.37). Oleh karena, masih dibutuhkannya lahan seluas 493 hektar yang merupakan tanah milik masyarakat maka PT. Pertamina melakukan pembebasan lahan terlebih dahulu sebelum melakukan pembangunan kilang.

Namun demikian, upaya pembebasan lahan dari PT. Pertamina ternyata mendapat penolakan dan perlawanan secara fisik dan simbolik oleh warga setempat sehingga memunculkan konflik. Dalam proses pembebasan lahan tersebut, masyarakat menolak menjual tanahnya untuk digunakan sebagai lahan pembangunan kilang. Hal tersebut disebabkan mayoritas masyarakat menggunakan tanah tersebut sebagai lahan untuk pertanian. Warga terdampak terus melakukan aksi penolakan mulai dari ditetapkannya sebagian wilayah Kecamatan Jenu untuk dijadikan lokasi pembangunan kilang. Berbagai macam aksi dilakukan oleh warga mulai dengan aksi demonstrasi yang dilakukan warga di lokasi yang akan

dibangun kilang (Sumber: www.kabarjawatimur.com, diakses pada 16 Juli 2019 pukul 18.40). Demonstrasi juga dilakukan oleh warga sekitar sewaktu dilakukannya sosialisasi di dua tempat yang berbeda, yaitu di Kantor Kecamatan Jenu dan Balai Desa Sumurgeneng. Warga melakukan demonstrasi hingga membawa beberapa spanduk yang bertuliskan penolakan pembangunan kilang.

Nilai historis dan religi juga dimunculkan masyarakat dalam aksinya. Masyarakat setempat juga mengadakan aksi arak tumpeng keliling kampung sebagai wujud penolakan pembangunan kilang. Aksi yang dilakukan oleh ratusan warga terdampak digelar untuk mendoakan para tokoh yang dulu telah berjuang hingga tumpah darah penghabisan untuk membela tanah air tercintanya yang hingga sekarang dapat ditempati oleh para generasi penerusnya. Masyarakat setempat berpendapat bahwa tanah tersebut merupakan tanah kelahirannya dan akan memperjuangkan tanah kelahirannya (Sumber: www.suaraindonesia.co.id, diakses pada 12 Juli 2019 pukul 17.15).

Selain itu, penolakan secara verbal juga dilakukan kepada aparat pemerintah. Masyarakat melakukan penolakan

pengukuran pembebasan lahan yang akan dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tuban dengan cara melakukan konfrontasi terhadap petugas yang datang baik secara fisik maupun verbal dengan cara membentangkan poster dan spanduk yang bertuliskan “masyarakat menolak BPN”. Bahkan masyarakat juga sempat melakukan pengusiran petugas yang sedang melakukan pengukuran, sehingga proses pengukuran selanjutnya mendapat penjagaan dari aparat kepolisian dan juga TNI (Sumber: diolah dari www.teras.id, www.suaraindonesia.com, www.timesindonesia.co.id, diakses pada 12 Juli 2019 pukul 20.05).

Adanya penolakan secara fisik, verbal maupun simbolik dari masyarakat Desa Wadung dan Sumurgeneng tersebut menegaskan bahwa masyarakat menunjukkan bahwa mereka mempertahankan hak mereka atas pemanfaatan lahan secara sah dan menyebabkan konflik pembebasan lahan sehingga menarik untuk dikaji lebih mendalam. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Dinamika Konflik Pembebasan Lahan Kilang Minyak di Kabupaten Tuban serta mengetahui faktor yang menyebabkan konflik dalam pembebasan lahan kilang minyak di Kabupaten Tuban dan penelitian ini

diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah dan PT. Pertamina selaku pemangku kepentingan sehingga dapat meminimalisir terjadinya konflik dan dapat menyelesaikan konflik dengan baik tanpa merugikan salah satu pihak. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian penelitian terkait konflik pengolahan sumber daya alam lebih lanjut.

Konflik merupakan sebuah hal yang dinamis, oleh karena itu konflik dapat berubah setiap saat, melalui berbagai tahapan aktivitas, intensitas ketegangan dan kekerasan yang berbeda. Terdapat beberapa tahapan konflik yang dapat menggambarkan dinamika aktivitas dan perkembangan konflik. Menurut Haris dan Reilly (2000) konflik dimulai dengan fase eskalasi, polarisasi, krisis dan destruktif. Sedangkan menurut Fisher (2000) ada lima tahapan konflik yang pada umumnya disajikan secara berurutan, walaupun kenyataannya dapat terjadi dengan bervariasi tergantung pada situasi tertentu dan mungkin juga dapat berulang dalam siklus yang sama (Fisher, 2000). Dari dua teori tersebut, peneliti menggunakan teori dari Fisher (2000) untuk mengetahui dinamika konflik pembebasan lahan kilang minyak di Kabupaten Tuban, karena lebih terperinci dan menyeluruh

sehingga penelitian dapat dilakukan secara mendalam dan dapat dengan mudah diketahui tahapan konflik yang perlu diperhatikan secara lebih.

Adapun tahapan-tahapan yang dapat menggambarkan dinamika konflik menurut Fisher (2000) adalah:

1. Pra konflik: merupakan periode dimana konflik tersembunyi dari pandangan umum, meskipun satu pihak atau lebih mengetahui potensi jadinya konfrontasi.
2. Konfrontasi: tahap ini merupakan tahap dimana konflik menjadi semakin terbuka, masing-masing pihak mungkin mengumpulkan sumber daya dan kekuatan dan mungkin mencari sekutu. Hubungan kedua belah pihak menjadi tegang, mengarah pada polarisasi diantara para pendukung di masing-masing pihak.
3. Krisis: merupakan tahapan puncak konflik, ketika ketegangan atau kekerasan terjadi paling hebat. Komunikasi normal diantara kedua belah pihak mungkin putus.
4. Akibat: suatu krisis pasti akan menimbulkan suatu akibat dimana satu pihak mungkin mengalahkan pihak lainnya, atau mungkin melakukan gencatan senjata (jika perang terjadi).

5. Pasca konflik: merupakan tahap terakhir dalam konflik, dimana semua situasi telah diselesaikan dengan cara mengakhiri berbagai cara konfrontasi kekerasan, ketegangan berkurang dan hubungan mengarah ke arah lebih normal diantara dua pihak.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini membutuhkan informasi tentang interaksi nyata orang tertentu, peristiwa, dan kelompok secara langsung. Oleh karena itu metode kualitatif dapat membantu peneliti dalam meneliti objek dengan kondisi yang alamiah secara langsung, dimana peneliti merupakan instrumen kunci, pengambilan data dilakukan secara purposive, dan analisis data bersifat induktif atau kualitatif sehingga hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2015: 15).

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini telah dilakukan pada tanggal 9 Juli 2019-18 Mei 2020 dengan lokasi penelitian di Kabupaten Tuban.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan informan penelitian yang mampu memberikan informasi tentang permasalahan dinamika

konflik dan faktor yang menyebabkan konflik pembebasan lahan untuk pembangunan kilang yang diangkat dalam penelitian. Subjek yang dipilih merupakan informan yang mendapat dampak secara langsung dan yang mempunyai peran dalam proses pembebasan lahan sehingga data yang diperoleh akurat dan dapat dipercaya.

Subjek dalam penelitian penelitian ini adalah masyarakat Desa Wadung diantaranya BU, CA, AM, dan AI, masyarakat Desa Sumurgeneng diantaranya AA, MM, IH, dan NA, Bapak Saifurrahman Kepala Desa Wadung, Bapak Rusdiana Kepala Desa Sumurgeneng, Bapak Kabiyanto Kepala Dusun Sumurgeneng, Bapak Soetedjo Kepala Sub Seksi Pengukuran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tuban dan Bapak Erick *General Affair* PT. Pertamina Tbbm Tuban.

Data dan Sumber Data

Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi di lokasi penelitian. Sedangkan data sekunder diperoleh dari kajian Kementerian ESDM tentang kajian pembangunan kilang Indoneisa kedepan, Keputusan Menteri ESDM No. 807/K/12/MEM/2016, Buku Kecamatan Jenu dalam Angka, dan berbagai publikasi berita yang berkaitan dengan dinamika

konflik pembebasan lahan kilang minyak di Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban.

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan cara mengumpulkan data dimana peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu atau kelompok di lokasi penelitian (Creswell, 2018: 256). Dalam penelitian ini peneliti mengamati secara langsung di lokasi penelitian dengan menggunakan pedoman observasi yang telah dipersiapkan sebelumnya. Adapun aspek yang diobservasi meliputi kondisi fisik dan aktivitas sosial warga masyarakat kegiatan pembebasan lahan, kegiatan warga terdampak, dan kondisi desa terdampak.

2. Wawancara

Wawancara dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan *face-to-face interview* (wawancara berhadapan-hadapan) dengan partisipan, wawancara dengan telepon, atau terlibat dalam *focus group interview* (wawancara dalam kelompok tertentu) yang terdiri dari enam sampai delapan partisipan perkelompok (Creswell, 2018: 257). Wawancara dalam penelitian kualitatif memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur (*unstructured*) dan bersifat

terbuka (*openended*) yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dari para partisipan. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai secara langsung pihak terkait yang telah ditentukan sebelumnya oleh peneliti, dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian kualitatif dapat berupa dokumen publik, dokumen privat, foto, dan video (Creswell, 2018: 258). Dokumen publik dapat berupa, makalah, buku, dan koran. Sedangkan dokumen privat berupa buku harian dan surat. Studi dokumentasi juga bisa didapatkan dari penelusuran data online dengan pencarian data melalui internet. Dokumentasi dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder. Dalam penelitian ini peneliti membutuhkan data dokumen kajian Kementerian ESDM tentang kajian pembangunan kilang Indoneisa kedepan, Keputusan Menteri ESDM No. 807/K/12/MEM/2016, Buku Kecamatan Jenu dalam Angka, dan berbagai publikasi berita yang berkaitan dengan dinamika konflik dan faktor penyebab konflik pembebasan lahan untuk pembangunan kilang minyak di Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban. Data tersebut diperoleh secara langsung dan melalui pencarian berbasis internet.

Teknik Analisis Data

Untuk mengecek keabsahan data, peneliti menggunakan teknik pemeriksaan triangulasi data. Peneliti melakukan triangulasi data dengan cara mengumpulkan data dari beragam sumber dan digunakan untuk membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen agar dapat dianalisis seutuhnya. Setelah data di lapangan dinilai sudah valid, peneliti membandingkannya lagi dengan dokumen-dokumen pendukung.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman (2014) yaitu dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penetapan Kabupaten Tuban sebagai salah satu lokasi pembangunan kilang minyak baru tentunya berdasarkan kajian dan pertimbangan yang menyeluruh. Salah satu kebutuhan utama dalam pembangunan kilang minyak ini tentunya adalah ketersediaan lahan. Total keseluruhan jumlah kebutuhan lahan untuk pembangunan kilang adalah sebesar 841 hektar, dengan rincian seluas 348 hektar merupakan tanah milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berada di Desa Remen, Desa Rawasan dan

Desa Mentoso. Kemudian sisanya yaitu seluas 493 hektar yang berada di Desa Wadung dan Desa Sumurgeneng saat ini menjadi milik masyarakat membutuhkan proses pembebasan lahan oleh Pertamina. Secara umum masyarakat Desa Wadung dan Desa Sumurgeneng menolak pembebasan lahan dengan menjual tanahnya untuk pembangunan kilang (Sumber: www.kabarjawatimur.com, diakses pada 16 Juli 2019 pukul 18.40).

Menurut Fisher (2000) dalam penjelasannya tentang dinamika konflik, tahapan-tahapan konflik dapat diklasifikasikan menjadi 5 (lima) tahapan; pra-konflik, konfrontasi, krisis, akibat, dan pasca konflik. Konflik yang terjadi akibat dari upaya pembebasan lahan di Kabupaten Tuban ini akan dijelaskan peneliti dengan kacamata Fisher (2000) berdasarkan 5 (lima) tahapan tersebut. Namun pada proses dinamika konflik yang terjadi di Desa Wadung dan Desa Sumurgeneng hanya berhenti pada tataran akibat atau tahapan keempat, sebab hingga saat ini konflik antara masyarakat desa dengan PT. Pertamina belum juga berakhir. Hal tersebut dikarenakan sampai penelitian ini selesai dilaksanakan masih ada masyarakat yang menolak tanahnya untuk diukur. Hal tersebut dikarenakan masyarakat menginginkan harga

yang pasti sebelum masyarakat menyetujui tanahnya untuk dilakukan pengukuran sedangkan PT. Pertamina tidak bisa memberikan nominal angka yang pasti dan tidak mempunyai alternatif lain sehingga proses pembebasan lahan terhenti. Sedangkan Fisher (2000) pada penjelasannya menyebutkan tahap pasca konflik yang belum terjadi di Desa Wadung dan Desa Sumurgeneng, sehingga belum bisa diamati sebagai objek penelitian karena konflik belum dapat terselesaikan.

Dinamika Konflik Pembebasan Lahan Kilang Minyak di Kabupaten Tuban

1. Pra Konflik

Tahap ini merupakan sebuah periode dimana terjadi ketidaksesuaian sasaran diantara dua pihak atau lebih sehingga dapat menyebabkan konflik (Fisher, 2000). Konflik masih tersembunyi dari pandangan umum, meskipun satu pihak atau lebih mengetahui potensi jadinya konfrontasi. Ketidaksesuaian sasaran terjadi diantara perusahaan dengan Pemerintah Desa Wadung dan Pemerintah Desa Sumurgeneng. Hal ini terjadi pada proses pemberitahuan awal terkait rencana pembangunan kilang minyak baru dilingkungan desa terdampak. Pihak perusahaan bersama dengan pemerintah daerah memberikan informasi kepada masing-masing pemerintah desa dengan

harapan agar segera disampaikan kepada sasaran yaitu masyarakat desa bahwa akan ada pembebasan lahan di lingkungan desanya. Masing-masing pemerintah desa menahan pemberitahuan ini beberapa saat untuk disampaikan kepada masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menekan terjadinya konfrontasi yang akan muncul dimasyarakat, sehingga terdapat ketidaksesuaian rencana pemberitahuan awal kepada masyarakat setempat. Ketidaksesuaian sasaran tersebut menyebabkan masyarakat yang mendengar isu terkait adanya pembebasan lahan mencari informasi dengan sendirinya dan menimbulkan mispersepsi.

Selain itu pada tahap ini Fisher (2000) menjelaskan terdapat ketegangan hubungan antara beberapa pihak atau keinginan untuk menghindari kontak satu sama lain pada tahapan ini. Ketegangan ini mulai muncul saat isu terkait pembebasan lahan di Desa Wadung dan Desa Sumurgeneng mulai terdengar oleh masyarakat. Ketegangan yang muncul tidak hanya terjadi diantara pihak perusahaan dengan masyarakat, namun juga menyebabkan ketegangan diantara masyarakat itu sendiri. Sebab setelah mendengar kabar terkait pembebasan lahan tersebut, masyarakat mulai gelisah dan sesegera mungkin mengambil sikap. Ketegangan tersebut kerap kali dirasakan

ketika masyarakat bertemu dengan masyarakat lain yang berbeda pendapat terkait pembebasan lahan tersebut. Ketegangan ini terus memanas hingga akhirnya pemberitahuan terkait rencana pembangunan kilang minyak baru di Kabupaten Tuban yang akan menyebabkan pembebasan lahan di kedua desa tersebut resmi disampaikan oleh pihak pemerintahan desa.

2. Konfrontasi

Menurut Fisher (2000) tahap ini merupakan tahap dimana konflik menjadi semakin terbuka, jika hanya ada satu pihak yang merasa ada masalah, mungkin para pendukungnya mulai melakukan aksi atau perilaku kontradiktif lainnya. Masyarakat Desa Wadung dan Desa Sumurgeneng semakin terbuka satu sama lain untuk menunjukkan bahwa posisi mereka berada dipihak pro ataupun kontra. Hal ini tentunya mendorong konflik semakin terbuka antara keduanya. Selain itu, konflik yang terjadi diantara masyarakat dengan perusahaan dan atau BPN Kabupaten Tuban selaku pihak yang bertugas untuk melakukan pengukuran tanah di lokasi tersebut juga semakin terbuka. Palsanya jika terdapat petugas BPN datang ke lokasi pengukuran tanah milik salah satu anggota kelompok kontra, masyarakat akan saling memberi kabar dan akhirnya

berkumpul untuk mengusir petugas BPN tersebut. Hal ini lah yang dijelaskan Fisher (2000) dalam teori konfrontasinya.

Fisher (2000) juga menegaskan bahwa pertikaian atau kekerasan pada tingkat rendah juga terjadi diantara dua pihak. Masing-masing pihak lainnya mungkin mengumpulkan sumber daya dan kekuatan dan mungkin mencari sekutu dengan harapan dapat meningkatkan konfrontasi dan kekerasan. Hubungan kedua belah pihak menjadi tegang, mengarah pada polarisasi diantara para pendukung di masing-masing pihak. Polarisasi diantara masyarakat benar-benar ada dan bersifat terbuka. Pihak pro dan kontra sama-sama mengumpulkan sumber daya, khususnya sumber daya manusia yaitu anggota kelompok. Mereka saling memberikan pengaruh dilingkungan masyarakat untuk meningkatkan anggotanya. Kuantitas anggota tentunya akan meningkatkan kekuatan kelompok. Namun harus diakui bahwa kelompok masyarakat kontra lebih kuat dari pada kelompok masyarakat pro. Sebab kelompok masyarakat kontra lebih terbuka dan menunjukkan kekuatannya secara terang-terangan, sedangkan kelompok masyarakat pro banyak bekerja secara tertutup atau diam-diam. Bahkan untuk menunjukkan kekuatan tersebut, kelompok kontra telah memasang

banyak baliho atau spanduk-spanduk penolakan pembebasan lahan di beberapa sudut Desa Wadung dan Desa Sumurgeneng.

Meskipun konflik semakin terbuka, hal tersebut hanya memunculkan polarisasi kelompok pro dan kontra yang ada di masyarakat dan ketegangan yang terjadi masih dalam tahap rendah atau dapat ditoleransi.

3. Krisis

Fisher (2000) menyebut krisis merupakan tahapan puncak pada konflik. Ketika ketegangan atau kekerasan terjadi paling hebat. Komunikasi normal diantara kedua belah pihak mungkin putus. Pernyataan-pernyataan umum cenderung menuduh dan menentang pihak lainnya. Puncak konflik yang terjadi dalam upaya pembebasan lahan di Desa Wadung dan Desa Sumurgeneng ini adalah terjadinya aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat di Kantor DPRD Kabupaten Tuban. Tidak hanya masyarakat dari kedua desa tersebut yang turut menyuarakan aspirasinya, melainkan juga masyarakat dari desa lain yang merasa pernah mengalami hal yang sama terkait pembebasan lahan juga turut meramaikan aksi penolakan pembebasan lahan tersebut. Masyarakat melakukan demonstrasi dengan tuntutan untuk menolak pembangunan kilang karena masyarakat

tidak merasa memiliki kepentingan terhadap pembangunan tersebut. Seperti yang telah dijelaskan Fisher (2000) bahwa dalam tahap krisis komunikasi kedua belah pihak terputus, sehingga cenderung muncul banyak tuduhan dan saling menentang. Adanya berbagai tahapan komunikasi pada upaya-upaya sebelumnya tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Pihak pemerintah daerah dan juga perusahaan tidak mengambil langkah pasti dalam aksi ini. Pemerintah daerah hanya menerima aspirasi tersebut dengan mendengarkan tuntutan masyarakat dan berjanji akan menyampaikan kepada pimpinan DPRD untuk segera dibahas dengan pihak-pihak terkait. Sedangkan PT. Pertamina tidak memberikan tanggapan apapun terkait aksi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat tersebut.

Meskipun kekerasan tidak terjadi dalam tahap ini, akan tetapi ketegangan yang terjadi sudah mencapai titik terparah dan sudah tidak dapat ditoleransi karena komunikasi antar pihak sudah terputus. Hal tersebut menyebabkan penawaran penyelesaian konflik akan sulit diterima.

4. Akibat

Fisher (2000) menjelaskan bahwa suatu krisis pasti akan menimbulkan suatu akibat dimana satu pihak mungkin mengalahkan pihak lainnya. Satu pihak

menyerang atas desakan pihak lain. Kedua pihak mungkin setuju bernegosiasi, dengan atau tanpa bantuan perantara. Apa yang telah dijelaskan Fisher (2000) dalam tahap akibat dinamika konflik ini belum terjadi. Masing-masing pihak dalam konflik pembebasan lahan ini masih terus memperjuangkan kepentingannya dan mengabaikan keinginan satu sama lain, sehingga belum bisa ditentukan pihak mana yang dikalahkan. Keduanya pernah melakukan negosiasi terkait kompensasi harga jual tanah tapi tidak mencapai kesepakatan bersama. Pasalnya pihak perusahaan tidak memberikan nominal kompensasi yang bulat, karena harus menunggu proses pengukuran dan penilaian yang dilakukan oleh pihak BPN Kabupaten Tuban, baru kemudian bisa ditentukan nominal harga atas tanah tersebut. Sedangkan masyarakat menginginkan nominal bulat sebelum memutuskan untuk bersedia atau tidaknya tanahnya untuk dilakukan pengukuran, sehingga membuat banyak masyarakat sulit untuk percaya.

Satu pihak yang mempunyai otoritas atau pihak ketiga lainnya yang lebih berkuasa mungkin memaksa kedua pihak untuk menghentikan pertikaian. Bagaimanapun keadaannya, dengan kemungkinan adanya penyelesaian. Namun sayangnya, pemerintah daerah sebagai pihak yang memiliki otoritas

lebih untuk mengatur kedua belah pihak juga tidak menawarkan penyelesaian yang tepat. Pemerintah daerah hanya menerima aspirasi dari masyarakat tersebut dengan menyampaikan tuntutan kelompok aksi kepada pimpinannya. Setelah kegiatan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat hingga saat ini belum ada keterangan apapun yang diberikan oleh pemerintah daerah terkait upaya pembebasan lahan di Desa Wadung dan Desa Sumurgeneng. Sementara masyarakat desa terus berjaga-jaga mengamankan lingkungannya dari upaya pembebasan lahan tersebut.

Faktor-faktor yang Menyebabkan Dinamika Konflik

Konflik pembebasan lahan terjadi akibat tidak tercapainya tujuan bersama antara pemerintah, perusahaan, dan juga masyarakat. Perbedaan pendapat antara pihak satu dengan lainnya yang terus berkembang menyebabkan konflik semakin luas dan meningkat hingga mendorong terjadinya aksi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat. Menurut Malik (2003), terdapat empat faktor penting yang menyebabkan terjadinya suatu konflik. Faktor-faktor ini kemudian digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana pengaruh yang diberikan terhadap konflik pembebasan lahan di Desa Wadung dan Desa Sumurgeneng.

Identifikasi konflik yang dijelaskan oleh Coser (1956) telah membagi penyebab konflik menjadi dua jenis, yaitu konflik yang terjadi secara realistis dan non-realistis. Berdasarkan teori Coser (1956) tersebut dapat dianalisis bahwa konflik pembebasan lahan di Desa Wadung dan Desa Sumurgeneng termasuk dalam kategori konflik realistis. Hal ini didasarkan karena konflik disebabkan oleh kekecewaan dari kasus-kasus sebelumnya yang menyebabkan masyarakat tidak ingin menjual tanah mereka untuk pembangunan kilang minyak, meskipun dulunya tidak semua masyarakat Desa Wadung dan Desa Sumurgeneng yang mengalami kekecewaan. Kekecewaan yang dimaksud bisa berasal dari pengalaman kelompok lain dengan kasus pembebasan lahan yang dapat diketahui aspek kerugiannya.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan konflik ini terjadi adalah:

1. Perbedaan cara pengumpulan informasi

Menurut Malik dalam teori faktor penyebab konflik, munculnya perbedaan cara masyarakat dalam mendapatkan informasi akan memberikan pengaruh kepada perbedaan informasi yang diterima. Informasi menjadi sumber acuan yang digunakan masyarakat untuk menentukan sikap dan keputusan yang diambil. Jika

informasi yang diperoleh bukanlah informasi yang tepat dan berbeda antara masyarakat satu dengan yang lainnya tentunya dapat menyebabkan dan atau meningkatkan konflik yang sedang terjadi. Dalam hal ini sumber informasi upaya pembebasan lahan yang tidak diketahui penyebaran isunya menjadi sumber informasi yang sangat beragam untuk diterima oleh masyarakat, sehingga perbedaan informasi terkait pembebasan lahan ini didapatkan sesuai dengan sumber mana yang didengar oleh masyarakat. Isu ini terus beredar hingga akhirnya pihak pemerintah desa memberikan informasi secara resmi kepada masyarakat. Perbedaan ini secara tidak langsung mendorong pembentukan polarisasi antar masyarakat. Sebab masyarakat yang mendapatkan informasi dengan sumber yang sama mereka akan tergabung dalam kelompok yang sama juga tentunya. Perbedaan sumber informasi ini tentunya mempengaruhi pola pikir awal mereka. Beberapa masyarakat yang mendapatkan informasi-informasi negatif terhadap upaya pembebasan lahan ini akan banyak menolak upaya tersebut. Masyarakat yang lebih banyak menerima kabar positif dari upaya ini juga akan lebih banyak bisa menerima pembebasan lahan yang akan dilakukan.

2. Ketidaksepakatan mengenai data yang

relevan

Menurut Malik (2003) ketidaksepakatan terkait data yang relevan juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan konflik. Dalam hal ini ketidaksepakatan mengenai data urgensi pembangunan kilang yang dimiliki PT. Pertamina berbeda dengan urgensi pemanfaatan lahan oleh masyarakat. Mayoritas masyarakat yang berprofesi sebagai petani berpendapat bahwa pembangunan kilang hanya akan membuat warga kehilangan sumber mata pencaharian utama dan hanya akan menguntungkan pihak perusahaan saja. Meskipun pihak perusahaan berjanji akan membuka lapangan pekerjaan akan tetapi masyarakat menyadari kapasitas mereka yang hanya sebagai petani tidak akan dapat bekerja dalam bidang industri minyak. Perbedaan tersebut yang menjadi salah satu penyebab konflik dalam pembebasan lahan pembangunan kilang minyak PT. Pertamina.

3. Perbedaan cara menerjemahkan dan mengkaji informasi

Perbedaan sudut pandang antara pihak perusahaan yang lebih menekankan kepada ketersediaan sumber daya alam dengan masyarakat yang lebih menekankan pada kondisi sosial ekonomi merupakan alasan munculnya penolakan sehingga menyebabkan konflik. Hal tersebut

dikarenakan masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pengkajian dalam pembuatan kebijakan pembangunan kilang dan penentuan lokasi kilang. Selain itu perusahaan juga belum dapat memberikan alternatif kebutuhan sosial-ekonomi sehingga menimbulkan halangan tersendiri untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Jika dikaitkan dengan pendapat Coser dalam memaknai konflik realistik. Kajian yang digunakan perusahaan dalam proses konflik ini merupakan sebuah dasar atau keputusan politik yang pada akhirnya akan menimbulkan perebutan kekuasaan atau klaim kekuasaan, tergantung keputusan (kajian) mana yang lebih banyak diyakini kebenarannya.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dinamika konflik dalam pembebasan lahan untuk pembangunan kilang minyak PT. Pertamina sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Fisher (2000). Akan tetapi konflik hanya berhenti pada tahapan akibat, karena masih terdapat masyarakat yang menolak tanahnya untuk diukur dan belum dapat ditentukan pihak mana yang kalahkan, sehingga konflik belum dapat terselesaikan dengan baik. Kemudian faktor yang menyebabkan secara umum adalah perbedaan pendapat

antara pihak satu dengan lainnya yang terus berkembang. Hal ini dilihat dari indikator dinamika konflik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pertama pra konflik, dimana ketegangan mulai muncul di tengah masyarakat karena mulai terdengar isu tentang pembebasan lahan dan mulai memanas ketika pemberitahuan terkait pembebasan lahan resmi disampaikan oleh pihak pemerintah desa.

Kedua, konfrontasi dimana konflik mulai terbuka, masyarakat melakukan pemasangan baliho bertuliskan penolakan terhadap kilang minyak dan pembebasan lahan. Bahkan terjadi pengusiran petugas pengukuran dari BPN Kabupaten Tuban. Ketiga, krisis yang ditandai dengan putusnya komunikasi dari berbagai pihak, ditandai dengan adanya demonstrasi besar di depan gedung DPRD Kabupaten Tuban yang dilakukan masyarakat dari berbagai desa dengan total massa mencapai 1000 orang. Keempat, akibat dimana PT. Pertamina masih belum menawarkan opsi penyelesaian yang tepat, sehingga negosiasi yang terjadi belum mencapai kesepakatan bersama.

Faktor-faktor yang menyebabkan konflik dalam pembebasan lahan kilang minyak di Kabupaten Tuban diantaranya adalah perbedaan cara pengumpulan informasi, ketidaksepakatan mengenai data

yang relevan dan perbedaan cara menerjemahkan dan mengkaji informasi. Oleh karena itu, pemerintah dan PT. Pertamina diharapkan dapat melakukan antisipasi dan menyelesaikan konflik dengan baik berdasarkan tahapan-tahapan dalam dinamika konflik sehingga konflik dapat terkendali dan diselesaikan dengan baik sehingga dapat menguntungkan semua pihak.

SARAN

Dalam penyelesaian konflik ini terdapat beberapa saran dari hasil penelitian ini yang mengacu pada akar masalah yang dihadapi. Adapun saran kepada pemangku kepentingan terkait antara lain:

1. PT. Pertamina selaku perusahaan yang akan membangun kilang harus meningkatkan komunikasi dan koordinasi yang efektif dan efisien dengan Pemerintah Desa ataupun dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tuban sehingga tidak terjadi perbedaan informasi yang beredar di masyarakat dan dapat menyelesaikan konflik dengan baik.
2. Selain itu, juga diharapkan untuk melibatkan masyarakat terdampak terhadap semua proses mulai dari pengkajian, pembangunan hingga pengoperasian kilang sehingga masyarakat dapat percaya dan mendukung adanya kilang minyak dapat membawa manfaat secara langsung.

Daftar Pustaka

- Amelia, A (2018). *Pertamina Susun Kajian Cari Lokasi Terbaik Bangun Kilang Tuban*.
<https://katadata.co.id/berita/2018/11/15/pertamina-susun-kajian-cari-lokasi-terbaik-bangun-kilang-tuban/>
diakses 15 Juli 2019 pukul 21.10
- Choirudin, A. (2019). *MA Kabulkan Kasasi Gubernur Jatim dan Pertamina Terkait*.
<https://www.timesindonesia.co.id/read/news/223339/ma-kabulkan-kasasi-gubernur-jatim-dan-pertamina-terkait-penlok-kilang-tuban/>
diakses pada 12 Juli 2019 pukul 20.05
- Coser, L. (1956). *The Function of Social Conflict*. New York: Free Press.
- Creswell, J., & Creswell, J. (2018). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Los Angeles: SAGE.
- Fisher, S. (2000). *Mengelola Konflik Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak*. New York: Zed Books.
- Harris, P., & Ben, R. (2000). *Demokrasi dan Konflik yang Mengakar: Sejumlah Pilihan untuk Negosiator*. Jakarta: International Institute Democracy.
- Kementerian ESDM RI (2016). *Ringkasan Eksekutif Kajian Pengembangan Kilang Indonesia Kedepan*. Kementerian ESDM RI.
- Keputusan Menteri ESDM RI Nomor 807/K/12/MEM/2016 *tentang Penugasan Kepada PT Pertamina (Persero) dalam Pembangunan dan Pengoperasian Kilang Minyak di Tuban, Provinsi Jawa Timur*.

Malik, I. (2003). *Menyeimbangkan Kekuatan: Pilihan Strategi Menyelesaikan Konflik atas Sumber Daya Alam*. Jakarta: Yayasan Kemala.

Nugroho, S (2019). *Warga Sumurgeneng Hadang Pengukuran Lahan Kilang Tuban*.

<https://www.teras.id/news/pat-54/165542/warga-sumurgeneng-hadang-pengukuran-lahan-kilang-tuban/> diakses pada 10 Juli 2019 pukul 19.30

Pradah (2019). *Tolak Pendirian Kilang Minyak, Warga Tuban Gelar Demo*.
<https://www.kabarjawatimur.com/tolak-pendirian-kilang-minyak-warga-tuban-gelar-demo/> diakses pada 16 Juli 2019 pukul 18.40

Said, M. (2019). *Wujud Penolakan Kilang Tuban*.
<https://m.suaraindonesia.co.id/read/5025/20190323/183159/wujud-penolakan-kilang-tuban-ratusan-warga-arak-tumpeng-keliling-kampung/> diakses pada 12 Juli 2019 pukul 17.15.

Wiyono, S (2019). *Dua Tim BPN Turun ke Lahan Kilang Minyak*.
<http://bloktuban.com/2019/06/19/dua-tim-bpn-turun-ke-lahan-kilang-minyak/?m=0/> diakses pada 14 Juli 2019 pukul 19.37